



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN AGAMA  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : THOMAS PENTURY
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL
3. NHK : 250981

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 3.701.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 360 m<sup>2</sup>/340 m<sup>2</sup> di KOTA AMBON ,  
HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m<sup>2</sup>/120 m<sup>2</sup> di KOTA AMBON ,  
HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m<sup>2</sup>/250 m<sup>2</sup> di KOTA AMBON ,  
HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah Seluas 1531 m<sup>2</sup> di SERAM BAGIAN BARAT, HASIL  
SENDIRI Rp. 600.000.000
5. Tanah Seluas 10 m<sup>2</sup> di KOTA AMBON , HASIL SENDIRI Rp.  
1.500.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 870 m<sup>2</sup>/200 m<sup>2</sup> di SERAM BAGIAN  
BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 505.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2010, HASIL  
SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOBIL, NISSAN LIVINA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.  
95.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.  
230.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 59.000.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. 770.000.000****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 1.162.000.000**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.197.500.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.197.500.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.